

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA HILISERANGKAI KECAMATAN
IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN**

**Parlindungan, Marpaung
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
E-mail : parlindunganmarpaung@gmail.com**

ABSTRACT

This study discusses about Community Participation and Leadership Capability of the Village Head Against the Success of Development in Hiliserangkai Village, Idanotae Sub-District, South Nias Regency. Many problems often occur until now and one of them is the construction of inadequate infrastructure. The issue becomes an obstacle in the process of region's progress and also hinders the progress of life, both in welfare, trade, agriculture, etc. This was due to the lack of attention from the government in the development and coordination of the regions. In addition, the community is not involved in the development program, but only involves certain people in the village. Theory and Concept of development and also the leadership capacity of the Village Head are inseparable in the success of development activities. The ability of the village's leader in the succeeding village's development is very important and central. This can help provide solutions in solving problems in the development process. These concepts and theories can be used as guidelines in implementing better and ideal development activities that aim for progress and mutual interests. The purpose of development is to provide a positive impact on the entire community which covers all aspects of life. The research method used in this study is a qualitative research method. The research method used in this research is a cauliflower research method and with 15 informants. The conclusion is that the conditions of development, development programs, the ability of village leaders to fight for development are still not optimal and inadequate. In accordance with the results of the research, observations and data obtained from the research location, it can be said that the leadership capacity of the village's leader has not been successful. In addition, the inhibiting factors both internally and externally also become obstacles in the process of development progress. Community response and forms of community participation are still very lack and wait the attention of the government only.

Keywords: *Role, Village Chief and Development*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas

daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan

peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4 (empat) menyebutkan :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Hiliserangkasi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan, diantaranya :

1. Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan dalam pengalokasian dana desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa,
2. SDM masyarakat kurang memadai,
3. Kepala desa yang kurang transparan terhadap setiap anggaran yang diluncurkan dalam

- program-program pembangunan infrastruktur desa,
4. Kurangnya koordinasi kepala desa kepada seluruh lembaga desa dan juga kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa,
 5. Hubungan antara Kepala Desa dengan BPD kurang harmonis,
 6. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh kepala desa.

Jadi penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Hiliserangkasi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Melihat situasi ini, maka peneliti merasa tertarik untuk menulis tentang "Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hiliserangkasi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengetahui serta melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan informasi secara konkret di lokasi penelitian. Adapun judul penelitian skripsi yang diangkat oleh peneliti adalah "***Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Hiliserangkasi Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan)***".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah di tuangkan pada latar

belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hiliserangkai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hiliserangkai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni :

1. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hiliserangkai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil

keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 (empat) ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

2.3. Definisi Konsep Operasioanl

a. Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2010:38).

b. Macam-Macam Variabel Penelitian

Menurut hubungan antara satu variabel penelitian dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. variabel Independen yaitu variabel yang sering disebut dengan variabel stimulus atau prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2. variabel dependen yaitu sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2010 : 39).

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka yang menjadi variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah :

Variabel Bebas (*independen*) yaitu :
Peranan

Variabel Bebas (*independen*) yaitu :
Kepala Desa

Variabel terikat (*dependen*) yaitu:
Pembangunan Infrastruktur.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Dilihat dari aspek metode penelitian maka untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:11-12) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkirakan gejala yang akan terjadi disebabkan dasar data yang didapat di lapangan.

3.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006:145), subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Lincoln dan Guba dalam sugiyono (2007:301), mengemukakan bahwa : penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan

sampel tidak didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain teknik observasi, teknik wawancara dengan menggunakan rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Secara umum, lokasi penelitian “Desa Hiliserangkai” Kecamatan Idanotae

Kabupaten Nias Selatan. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan terdiri dari : sejarah singkat berdirinya lokasi penelitian, letak dan keadaan geografis dan batas-batas wilayah lokasi penelitian serta keadaan sosial budaya dan kondisi perekonomian desa Hiliserangkai.

1.2. Sejarah Desa Hiliserangkai

Terbentuknya Desa Hiliserangkai pada tahun 2009. Desa Hiliserangkai hasil dari pemekaran desa induk yaitu Desa Lahusa Idanotae di Kecamatan Gomo \Kabupaten Nias Selatan. Sebelum pemekaran Desa Hiliserangkai masih berstatus Dusun II desa Lahusa Idanotae yang terdiri dari beberapa lingkungan antara lain: Lingkungan Tetegewo, Lingkungan bawosaloo, Lingkungan Tetehesi, Lingkungan Tetegewo Satua, dan Lingkungan Hilifalago. Desa Hiliserangkai mendapatkan pengesahan desa secara defenitif oleh oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Peraturan Daerah tahun 2009. Dan pada tahun yang bersamaan di angkat Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Kepala Desa Hiliserangkai oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas nama Eduard Lase sampai dengan tahun 2011 dan pada akhir tahun 2011 di laksanakan pemilihan kepala desa defenitif dan yang terpilih kepala desa adalah Lalawauri lase Sampai sekarang.

1.3. Keadaan Demografi

Desa Hiliserangkai terletak di dalam wilayah Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan

Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

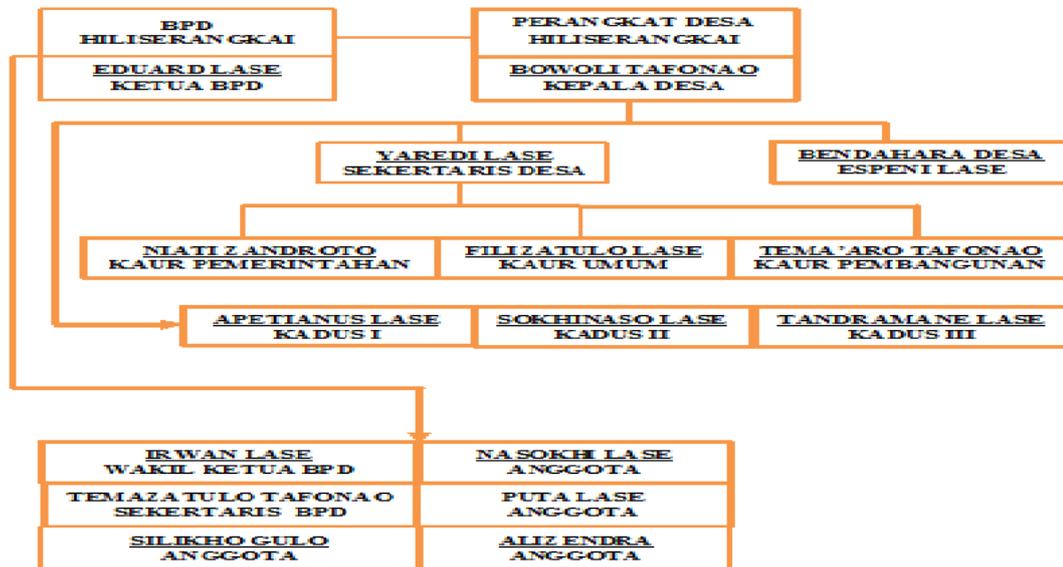
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hilisaloo Kec. Idanotae
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Orahua Kec. Idanotae
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahusa Ldanotae Kec. Gomo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lolosoni Kec. Gomo

Luas wilayah Desa Hiliserangkai adalah 10 Ha dimana 70% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 30% dataran di manfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Iklim desa Hiliserangkai sebagaimana desa-desa lainnya, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pertanian dan perkebunan yang ada di desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui struktur organisasi pemerintahan desa Hiliserangkai maka struktur organisasi desa Hiliserangkai kecamatan Idanotae menganut sistem kelembagaan pemerinathan desa dengan pola minimal. Selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan



V. PENUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan penjelasan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kemampuan Kepala Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat dalam sistem sosial secara keseluruhan guna kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, karenanya lingkup pembangunan meliputi mengadakan, membuat atau

mengatur suatu yang belum ada.

2. Kinerja dan kemampuan kepala desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hiliserangkai belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi.
3. Pembangunan yang ada di desa Hiliserangkai hingga saat ini masih belum cukup dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi terutama dalam hal memulihkan fungsi bangunan yang selama ini sudah tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum.

1.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan peneliti di atas, maka peneliti juga menguraikan beberapa saran yang dapat dijadikan

sebagai masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah, pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa dan juga kepada masyarakat desa.

Adapun yang menjadi saran-saran tersebut adalah :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait agar mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan sekaligus melakukan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
2. Diharapkan kepada Pemerintahan desa agar mampu mengarahkan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memulihkan fungsi dan manfaat bangunan yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Diharapkan kepada lembaga-lembaga desa dan juga kepada masyarakat desa agar lebih aktif dan mampu menjadi pengontrol terhadap kinerja kepala desa khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2013).

Pembangunan Perdesaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Djaman Satori. (2007). *Profesi Keguruan.* Jakarta : Universitas Terbuka.
- Hendarso. (2005). *Metode Dalam Data.* Jakarta : Salemba Manajemen.
- Handyaningrat, Soewarno. (2003). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Kamaludin, Rustian.(2003). *Ekonomi Transportasi.* Jakarta : Gahalia Indonesia.
- Kurniawan, Agung.(2005). *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaruan.
- Mankiw, N. G. (2003). *Makroekonomi.* Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta : Rhineka Cipta.
- Moloeng.(2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya: PMN.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian.* Cetakan Kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa.* Jakarta : Nusa Media.
- Poerwandari, E. Kristi. (2005). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta : Universitas Terbuka.

- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Robert, J. Kodoatie. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian.S.P. (2008). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siswanto, Bejo. (2012). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012).*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara.
- Sudarsono. (2007).*Kamus Hukum*.Edisi Baru. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta.
- Suhardono, Edy. (2001). *Teori Peran*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Bagong. (2005).*Metode Penelitian Sosial : Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Thoha, Miftah.(2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Smith. (2005). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga.